

TEOLOGI LOKAL DALAM KONTEKS GLOBAL

J.B. BANAWIRATMA*

Abstract

Today in the globalization process the poor is marginalized. This reflection is based on the Indonesian context of economic dependence and marginalization of the poor and the powerless. The analysis goes to axes of power namely state, market, and community. Market fundamentalism has penetrated into all kinds of powers in such a way that the powerless is excluded from the economic participation. The economic system is taking sides against the need of the poor people. The way of life of the early Christian gives an example how people live in common. The teaching of Jesus stresses very much on the preferential option of the poor. The idea of the globalization from below and the multitude might be a help to move forward to face the problem of social injustice in all areas and levels.

Keywords: poverty, marginalization, market fundamentalism, the common, multitude.

Abstrak

Saat ini di dalam proses globalisasi, kaum miskin semakin terpinggirkan. Refleksi ini didasarkan pada konteks ketergantungan ekonomi dan peminggiran kaum miskin dan tak berdaya di Indonesia. Analisis ini mengarah pada poros-poros kekuasaan, yaitu: negara, pasar, dan masyarakat. Fundamentalisme pasar telah memasuki seluruh strata kekuasaan

* Guru Besar Teologi pada Fakultas Teologi, UKDW Yogyakarta, dan “Religion and Contemporary Issues” pada program studi “Indonesian Religious Studies” yang dijalankan di UGM dan dikelola oleh *Indonesian Consortium for Religious Studies* (ICRS), yaitu sebuah konsorsium dari UGM, UKDW, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: banawiratma@staff.ukdw.ac.id.

sedemikian rupa sehingga yang tak berdaya dipinggirkan dari keterlibatan ekonomi. Sistem ekonomi justru tidak berpihak terhadap kebutuhan rakyat miskin. Cara hidup orang Kristen awal memberikan contoh bagaimana komunitas hidup bersama. Ajaran Yesus menekankan untuk mendahulukan orang miskin. Gagasan tentang globalisasi dari aras bawah dan *multitude* mungkin menjadi pendorong untuk menghadapi masalah ketidakadilan sosial di semua bidang dan tingkatan.

Kata-kata kunci: kemiskinan, marjinalisasi, fundamentalisme pasar, umum, *multitude*.

PENGANTAR

Dalam putaran global sekarang ini kaum miskin terdesak, tersingkir, dan terpaksa berada di pinggiran. Keberadaan mereka berhubungan dengan kekuatan-kekuatan yang meminggirkan. Namun terdapat juga orang-orang dan gerakan yang solider terhadap mereka. Dalam tulisan singkat ini akan dikemukakan beberapa pertimbangan mengenai semakin pentingnya teologi pinggiran pada era globalisasi sekarang ini. Pokok-pokok pikiran di sini diolah kembali dari *handout* yang berjudul “Teologi Pinggiran di Era Globalisasi” pada *Symposium on Liberated and Liberating Theologies in Asia, A Journey through Liberation Theology* yang diorganisasikan oleh PERSETIA di STT Jakarta, Februari 2014, ketika saya menyampaikan pengantar diskusi “The Power and the Common: A Liberative Perspective of an Indonesian”. Pertimbangan-pertimbangan yang lahir dari dalam konteks Indonesia berikut ini meliputi: (1) ketergantungan ekonomi dan peminggiran kaum miskin tak berdaya, (2) poros-poros kekuasaan yang meminggirkan, dan (3) gerakan untuk mengatasi peminggiran.

KETERGANTUNGAN EKONOMI DAN PEMINGGIRAN ORANG MISKIN TAK BERDAYA

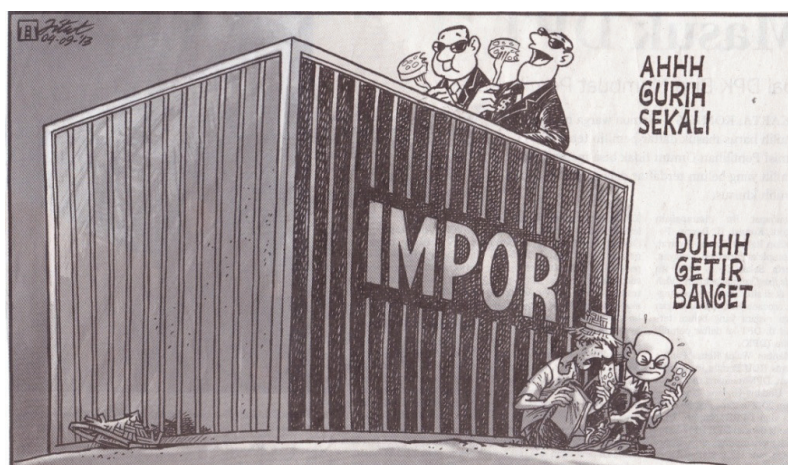
Krisis moneter 1998 merupakan tahun menentukan bagi kehidupan ekonomi Indonesia sampai saat ini. Tahun itu, tanggal 15 Januari, Presiden Soeharto menandatangani *letter of intent* (LOI) diawasi oleh Mr. Camdessus, *Managing Director* IMF. Peristiwa itu oleh Sri-Edi Swasono (2013:7), Guru Besar Universitas Indonesia dan Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa, dinilai sebagai:

“Penyerahan kedaulatan nasional balik, tidak kepada kolonialis Belanda, tetapi kepada *the global financial tycoons* atau *taoké-taoké* finansial global, yang bernaung di IMF. Menteri Keuangan dan gubernur Bank Indonesia terpukau pula pada petunjuk menjerumuskan IMF. Sejak itu makin kukuh kuku kaum kapitalis global mencengkeram Indonesia. Selanjutnya kita bukan lagi tuan di negeri sendiri. Kita menjadi jongsos globalisasi, penuh ketergantungan pada mancanegara, lengkap dimulai dari pangan, obat, sampai mesiu.”

Penilaian di atas semakin dibenarkan lagi dengan kenyataan penguasaan asing terhadap perekonomian Indonesia yang semakin kuat, dengan kemungkinan masih akan bertambah kuat lagi (lih. LAS, 2013).

Akhir November 2013 Wakil Presiden Boediono mengatakan bahwa penentuan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan kemudian mendapat talangan dana jangka pendek sebesar 6,7 triliun rupiah merupakan keputusan tepat. Buktinya Indonesia dapat melewati krisis ekonomi 2009 dan mengalami pertumbuhan ekonomi. Terhadap pernyataan itu dapat ditanyakan: Pertumbuhan ekonomi untuk siapa? Untuk rakyat miskin atau untuk segelintir orang atas? Ambil contoh kebijakan impor kedelai pertengahan tahun 2013, “Dengan menjual kedelai Rp 8.400 per kilogram, dipotong biaya pengapalan dan asuransi, para importir masih mengantongi untung minimal Rp 2.000 per kilogram atau Rp 1 triliun hanya dalam waktu dua bulan” (MAS/WHO et al., 2013).

Tidaklah demikian nasib bakul tempe dan tahu. Mereka harus memperkecil tempe dan tahunya supaya masih terbeli oleh para pelanggannya. Itulah akibat penetapan harga khusus kedelai oleh Kementerian Perdagangan. Karikatur mengenai impor kedelai berikut (*Kompas*, 9 September 2013) memperlihatkan kehidupan ekonomi yang pahit untuk rakyat kelas bawah.



Kehidupan ekonomi macam itulah yang oleh Boediono disebut sebagai pertumbuhan ekonomi? Pernyataan mengenai pertumbuhan ekonomi dari Boediono adalah berita buruk

mengenai ketimpangan ekonomi yang semakin melebar, dan merupakan kabar menyedihkan mengenai orang-orang kecil tak berdaya yang semakin dipinggirkan.

FUNDAMENTALISME PASAR

Istilah “kapitalisme” barangkali tidak cukup jelas menggambarkan kondisi yang diangkat di sini. “Kapital” atau “modal” bisa sangat berarti bagi perkembangan kehidupan ekonomi yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha kecil dan menengah. Masalahnya adalah “fundamentalisme pasar”, yang disebut juga dengan ekonomi “neo-liberalisme”.

Herry-Priyono (2005; 2006; 2008) secara singkat dan jelas menerangkan apa itu neo-liberalisme. Neoliberalisme menunjuk gejala yang mirip dengan liberalisme ekonomis akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yang didominasi oleh modal uang. Neoliberalisme menunjuk gejala ekstrem beberapa dekade terakhir ini. Proses ekonomi diatur dengan hukum sedemikian rupa sehingga pekerjaan manusia tidak selalu disubordinasikan oleh modal. Sekarang ini dalam neoliberalisme hukum secara ekstrem kehilangan kontrol atas modal.

Neo-liberalisme merupakan *virtualisasi ekonomi*. Didukung oleh revolusi teknologi informasi, ekonomi neo-liberalis memprioritaskan *financial capital*. Sektor real terdesak begitu rupa sehingga proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi dan jasa yang real. Ada pendapat bahwa produk finansial akan mengalir ke investasi pada sektor real misalnya dalam bentuk pabrik-pabrik yang memberikan lapangan kerja. Nyatanya tetesan itu terlalu kecil. Yang terjadi adalah *finance finances itself*, dan tidak membiayai investasi. Neo-liberalisme adalah cara para penguasa modal mengambil alih kekuasaan setelah dikontrol sejak perang dunia kedua sampai akhir tahun 1970-an. Anti neoliberalisme bukanlah anti-investasi dan bukan anti-pertumbuhan, melainkan anti-dehumanisasi.

Selanjutnya neo-liberalisme bukanlah sekadar ekonomi, melainkan suatu pandangan antropologis. Manusia sebagai *homo oeconomicus*, menjadi prinsip yang mengatur seluruh kehidupan masyarakat. Seluruh perilaku manusia didekati dan dimengerti dari perspektif ekonomi. Inilah dimensi yang membedakan neo-liberalisme dari liberalisme klasik. Neo-liberalisme, “menunjuk pada paham dan agenda menerapkan prinsip pasar-bebas bukan hanya sebagai prinsip koordinasi produksi-alokasi komoditas ekonomi, tetapi sebagai prinsip koordinasi produksi-alokasi semua bidang lain dalam tatanan masyarakat, bahkan sebagai prinsip koordinasi penataan seluruh masyarakat” (Herry-Priyono, 2008: 229).

Neo-liberalisme sebagai visi antropologis mereduksikan manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo oeconomicus*). Selanjutnya paham neo-liberalisme membiarkan dan mendukung keserakahan yang terorganisasikan melalui pasar dan perdagangan bebas, yang secara teologis Alkitabiah dapat disebut membadani Mammon, rival Allah (Mrk. 6:24; Luk. 16:9; Pieris, 2013). Kritik terhadap neo-liberalisme bukanlah anti-investasi, bukan anti-modal (kapital), bukanlah anti-pertumbuhan, bukanlah anti-ekonomi pasar. Yang harus ditolak bukanlah ekonomi pasar, melainkan neo-liberalisme alias “fundamentalisme pasar”, yang menjadikan pasar bebas sebagai prinsip pengatur yang menentukan seluruh tatanan kehidupan masyarakat. “Pokok perdebatan tidak terletak dalam penerimaan (*pro*) atau penolakan (*contra*) ‘mekanisme pasar’ bagi proses kehidupan ekonomi, melainkan sejauh mana kiranya mekanisme pasar ‘tertanam’ (*embedded*) atau ‘tercerabut’ (*dis-embedded*) dari kebutuhan, kapasitas, potensi produktif, serta relasi sosial orang-orang biasa” (Herry-Priyono, 2008: 219).

Ekonomi kapitalisme neo-liberalis merupakan ekonomi akumulasi kekayaan (*accumulation economy*). Sedangkan orang-orang Indonesia biasa yang miskin dan hampir miskin meliputi 100 juta lebih berada dalam kehidupan ekonomi yang mepet (*survival economy*). Pada tahun 1999 kapitalisasi dan kontrol pasar di Indonesia oleh keluarga bisnis (dalam persen) adalah sebagai berikut (Herry-Priyono, 2008: 221, mengambil dari Stijn Claessens *et al.* *Who Control East Asian Corporations?* World Bank Research Paper, 1999: 6).

<i>Kapitalisasi oleh berapa Keluarga Bisnis?</i>	<i>Persentase Kapitalisasi Pasar</i>
- 1 keluarga bisnis	- 16,6 %
- 5 keluarga bisnis	- 40,7%
- 10 keluarga bisnis	- 57,7%
- 15 keluarga bisnis	- 61,7%
<i>Kontrol kepemilikan di tangan siapa?</i>	<i>Persentase kontrol</i>
- Keluarga bisnis	- 71,5%
- Badan keuangan dan perusahaan	- 15,2 %
- Pemerintah	- 8,2%
- Warga biasa	- 5,1%

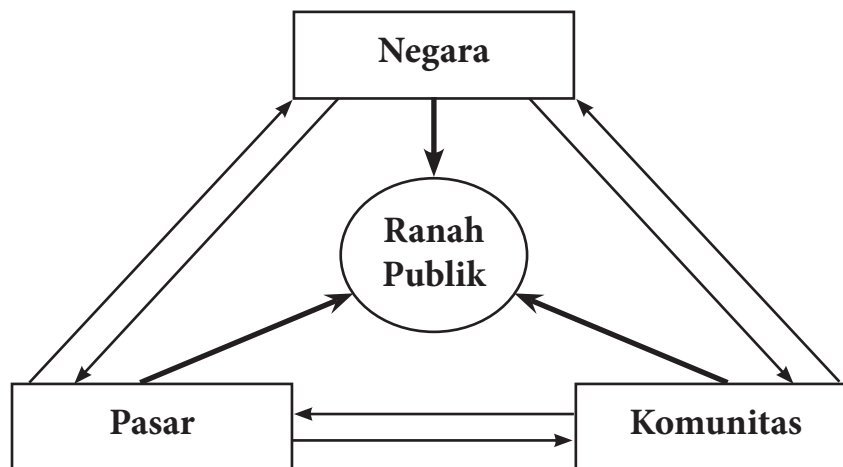
Data 16 tahun lalu itu kiranya masih dapat mengemukakan pertanyaan besar: Adakah ekonomi Indonesia ini ekonomi yang berkeadilan? Keluhan dari usaha kecil dan menengah,

keadaan tetangga-tetangga kita di dusun-dusun yang bertahun-tahun tampak tidak berubah, menegaskan bahwa kapital memang jauh dari mereka.

Kapitalisme yang berorientasi pada uang telah mendesak pasar sehat untuk kehidupan rakyat. David Korten memberikan gambaran bagaimana kapitalisme semacam itu berlawanan dengan pasar sehat. Ekonomi pasar sehat melayani rakyat biasa, tidak hanya sebagian (kecil) dari rakyat (Korten, 1999: 41).

	<i>Kapitalisme</i>	<i>Pasar Sehat</i>
(1) Prinsip menentukan	(1) Uang	(1) Kehidupan
(2) Penghela dominan	(2) Menggunakan uang untuk mendapatkan uang bagi mereka yang mempunyai uang	(2) Memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap orang
(3) Ukuran firma	(3) Sangat besar	(3) Kecil dan medium
(4) Biaya	(4) Ditanggung oleh publik	(4) Ditanggung oleh pemakai
(5) Kepemilikan	(5) <i>Impersonal, absentee</i>	(5) <i>Personal, rooted</i>
(6) <i>Financial capital</i>	(6) Global tanpa batas	(6) Lokal/nasional dengan batas-batas yang jelas
(7) Tujuan investasi	(7) Memaksimalkan keuntungan pribadi	(7) Meningkatkan hasil yang berguna
(8) Posisi keuntungan	(8) Sasaran semaksimal mungkin	(8) Suatu insentif untuk memajukan produktivitas
(9) Mekanisme pengaturan	(9) Direncanakan secara sentral oleh mega-korporasi	(9) Pasar-pasar dan jaringan-jaringan yang mengorganisasikan dirinya
(10) Tujuan kompetisi	(10) Mengeliminasi yang tidak sehat	(10) Meningkatkan efisiensi dan inovasi
(11) Peranan Pemerintah	(11) Melindungi kepentingan <i>property/assets</i>	(11) Memajukan kepentingan manusiawi
(12) Perdagangan	(12) Bebas	(12) <i>Fair and balanced</i>
(13) Orientasi politis	(13) Elitis, demokrasi dollar	(13) Populis, demokrasi pribadi-pribadi manusia

Peran Negara di mana? Ada 3 (tiga) poros kekuasaan yang menentukan ranah publik, yakni: (1) komunitas, (2) pasar, dan (3) negara. Diagram (Herry-Priyono, 2004):



Komunitas menunjuk hubungan dan kegiatan spontan dari para warga masyarakat tanpa ciri transaksi atau administrasi. Kerekatan antar warga menentukan hidup komunitas. Komunitas dapat terbentuk atas dasar sejarah, daerah, suku, ras, agama, atau bahasa yang sama. *Pasar* menunjuk transaksi ekonomis antara penjual dan pembeli yang dijalankan secara sukarela sesuai dengan barang dan jasa yang ada. Untung-rugi dan efisiensi ekonomis merupakan motif yang mendorong Bergeraknya pasar. *Negara* secara konkrit berarti tindakan-tindakan melalui badan-badan publik, yang bertanggung jawab untuk terwujudnya tatanan hidupan publik demi kesejahteraan bersama. Mereka juga mempunyai kuasa untuk mengatur tatanan sosial.

Tiga poros kekuasaan itu menentukan *ranah publik*, yang meliputi aset dan barang-barang publik, ruang publik, pelayanan-pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, dan lapangan kerja (Drache, 2001). Semakin ketiganya berfungsi baik, semakin ranah publik terjangkau oleh semua warga, juga oleh kaum miskin. Masalah besar kalau *pasar* menjadi monster serakah, *negara* menjadi negara centeng atau negara makelar, dan *komunitas* menjadi hakim sendiri dan main kekerasan. Masyarakat kehilangan rasa “kami” sebagai kesatuan sosial dari hidup bersama (Marquand, 2001).

Dari pembahasan di depan jelas bahwa telah sekian lama negara impoten menghadapi kekuasaan pasar. Dua contoh berikut memperjelas impotensi negara itu. Pertama adalah kasus konflik antara rakyat Papua dengan Freeport. Dalam konflik itu ada rakyat yang ditembak mati (lihat karikatur Kompas, 5 November 2011). Negara menjadi centeng bagi korporasi besar dan mengorbankan rakyat (lihat Wibowo, 2010).

Contoh kedua adalah kasus lisensi pemerintah yang diberikan untuk penambangan pasir besi. Kompas 29 Oktober 2013 melaporkan kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir besi

di Sulawesi Utara, di pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Timur. Kemudian, hari berikutnya (30 Oktober 2013), tajuk mengulas kebijakan yang tidak memakmurkan rakyat dan merusak ekosistem itu.

“Hutan bakau yang susah payah tumbuh dan berfungsi melindungi pantai dari gerusan ombak laut hilang karena pengerukan pasir besi. Kerusakan lingkungan tidak hanya terjadi pada penambangan pasir besi. Semua penambangan mengoyak muka Bumi. Bila penambangan di permukaan tanah, yang tersisa lubang-lubang besar. Ironinya, sebagian besar hasil tambang itu diekspor mentah dengan harga rendah.”

Tidak mengherankan kalau pada hari peringatan perikanan sedunia, 21 November 2013, kita menyaksikan bahwa:

“Sekitar 1.000 komunitas nelayan, petambak, dan lembaga swadaya masyarakat di Jakarta, Indramayu (Jawa Barat), Jepara (Jawa Tengah), Pangkal Pinang (Bangka Belitung), Langkat (Sumatra Utara), Bau-Bau (Sulawesi Tenggara), dan Manado (Sulawesi Utara) menggelar unjuk rasa, pameran (terapung) bahari, pentas seni pesisiran, festival makan ikan, menanam mangrove, dan menebar bibit ikan laut” (Lukita Grahadyarini, 2013)

Nelayan dan petani terkena dampak langsung dari penambangan dan kerusakan alam, karena merosotnya produksi hasil laut dan pertanian yang merupakan sumber hidup mereka. Pertemuan WTO di Bali (3-6 Desember 2013) memperlihatkan pertarungan antara Amerika Serikat, yang didukung negara-negara maju dan ekportir pangan lainnya, melawan India. India mau memberikan subsidi pertanian lebih dari 10% dari total *output* pertanian. Kecuali itu India juga mau membeli hasil produk petani India lebih tinggi daripada harga pasar untuk cadangan pangan. Amerika Serikat menolak dan mengecam India karena melawan gerak perdagangan bebas yang seharusnya mengurangi dan bukan menambah intervensi negara terhadap pasar. Padahal Amerika sendiri memberikan subsidi kepada petani sebanyak 360 miliar dollar AS, setara dengan 4.140 triliun rupiah, angka yang jauh lebih besar daripada keseluruhan subsidi dari semua negara-negara berkembang. Indonesia dan negara-negara berkembang seharusnya mendukung India, tetapi malah berada di pihak Amerika. Dengan subsidi yang sangat besar itu Amerika mempunyai surplus pangan dan menjual ke pasar internasional dengan harga artifial yang menghancurkan pertanian dan menyengsarakan para petani dari negara-negara berkembang (Santosa, 2013).

“Pola piramida struktur pertanian dan pangan yang ada saat ini adalah mendudukkan agrobisnis, produsen benih dan input pertanian, pertanian korporasi, pertanian kapitalistik, dan spekulasi pangan di puncak piramida dengan jumlah kurang dari 500.000 orang. Mereka sekaligus juga mendapatkan akses dan fasilitas mewah dari pemerintah. Adapun dasar piramida tersusun dari 26,13 juta keluarga

petani kecil atau 91 juta jiwa. Puncak piramida tersebut menekan ke bawah dan menyebabkan 5,1 juta keluarga petani kecil tercerabut dari lahan mereka dalam 10 tahun terakhir ini dan menjadi penyusun masyarakat miskin kota” (Santosa, 2014).

Demikianlah kenyataan yang terjadi sampai kini, swasembada pangan tanpa petani. Anggaran di sektor pangan dan pertanian mengesampingkan yang terpenting, yakni subsidi output, harga produk pertanian di tingkat petani. Tidak mengherankan kalau usaha swasembada pangan 30 tahun terakhir ini gagal (Santosa, 2015). Kemenangan kapital besar sedemikian yang berkepanjangan menyisihkan para petani kecil, tidak mengherankan kalau timbul kekuatiran mengenai ancaman bencana pangan menghadang di depan.

Pada zaman Yesus dan juga pada akhir abad pertama memang sudah berkembang perdagangan internasional, meskipun belum seperti yang kita alami sekarang ini, yakni *free trade*, perdagangan bebas. Pada tahun 2001 John Madeley, seorang penulis dan wartawan, menulis buku *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*. Tahun 2005 buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul yang lebih tajam, yaitu: *Loba, Keranjingan Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas*. Madeley memperlihatkan bahwa impor makanan yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang atau kurang berkembang naik secara tajam, sedangkan ekspornya tidaklah demikian. Retorika negara-negara kaya untuk mengurangi kemiskinan bersama dengan agresi mereka untuk liberalisasi perdagangan adalah kontradiksi dengan harapan sebagian besar dari dunia. Hal serupa dikatakan oleh Iman Pambagyo (2015), Duta Besar RI untuk WTO, bahwa perjanjian WTO lebih menguntungkan negara-negara maju, sementara negara berkembang dan kurang berkembang terus dihadapkan pada berbagai masalah domestik.

Akhir tahun ini akan diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asia (AEC, *Asian Economic Community*), di mana 10 negara Asia merupakan satu pintu untuk aliran bebas tidak hanya barang-barang, jasa, dan penanaman modal, melainkan juga termasuk *skilled labour*. Integrasi Indonesia dalam sistem pangan dunia akan menjadi semakin kuat lagi dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia. Akibatnya, gejolak ekonomi global akan semakin langsung menerpa para petani kecil yang rentan.

Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini mempunyai kepedulian terhadap yang miskin dan menderita. Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar dibagikan, begitu pula Kartu Asistensi bagi Orang dengan Kecacatan Berat. Pada KAA yang lalu (April 2015) Presiden Jokowi menyampaikan analisis mengenai sistem ekonomi dunia yang penuh ketidakadilan dan kesenjangan, dengan 1,2 miliar orang yang tidak berdaya dalam kemiskinan. Dia menyerukan pembubaran Bank Dunia (*World Bank*) dan Dana Moneter

Internasional (IMF), dua organisasi dari apa yang disebut “*unholy trinity*”. Namun sejauh saya tahu, organisasi ketiga, yakni Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang sangat agresif memajukan perdagangan bebas, belum disentuh secara konkrit. Malahan Presiden Jokowi mau menjadikan Indonesia basis produksi otomotif dan mendorong produsen mobil untuk memperluas investasinya. Ada kesan bahwa retorika politik-ekonomi beserta geraknya sama saja dengan dulu, yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi modal alias tetap berada dalam arus kapitalisme neo-liberalistik. Oleh karena itu, seperti sampai sekarang ini petani kecil tidak menjadi pelaku ekonomi yang lebih produktif dan lebih sejahtera.

GERAKAN UNTUK MENGATASI PEMINGGIRAN

Teologi Kristen melayani jemaat-jemaat yang mengikuti Yesus sebagaimana terdapat dalam Injil. Dalam Injil, Yesus hidup dan mati di pinggiran. Yesus adalah anak tukang, yang pada zaman itu bukanlah orang yang berkekurangan. Sebab, tukang merupakan keahlian yang memberikan penghasilan baik. Dalam bahasa kita sekarang dapat dikatakan bahwa Yesus termasuk kelas menengah. Namun Injil menggambarkan Yesus, yang memaklumkan Kerajaan Allah, berada di pinggiran. Tidak hanya dengan kata-kata, melainkan dengan seluruh hidup dan tindakan-Nya Yesus memaklumkan Kerajaan Allah, kerajaan keadilan dan perdamaian, kebenaran dan cinta kasih, suka cita dan persaudaraan semua orang. Pemakluman Yesus disambut oleh kaum pinggiran yang miskin secara fisik dan kaum miskin Injili, yakni orang-orang yang tidak miskin secara fisik dan yang solider terhadap kaum miskin fisik (Pieris, 1999). Akhirnya Yesus berhadapan dengan penguasa agama dan politik di pusat, dan mati dibunuh oleh mereka sebagai orang pinggiran. Bahkan Injil juga menggambarkan Yesus dilahirkan di pinggiran, di tengah-tengah gembala miskin.

Dari pinggiran Yesus marah. Peristiwa Yesus yang membersihkan bait Allah (Mrk. 11:15-19) biasa dilihat sebagai peristiwa Yesus yang marah. Umumnya tidak begitu disadari bahwa secara eksplisit diceritakan Yesus marah karena kesembuhan orang yang tidak utuh dipersalahkan demi hukum Sabat. Lagi pula kesembuhannya akan dijadikan alasan untuk mempersalahkan orang. Injil Markus 3:4-5 menceritakan Yesus yang marah karena kedegilan orang-orang yang terbelenggu oleh hukum Sabat. “Kata Yesus....: ‘Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?’ ... Ia berdukacita karena kedegilan mereka dan dengan *marah* Ia memandang sekeliling-Nya kepada mereka lalu Ia berkata kepada orang itu: ‘Ulurkanlah tanganmu!’ Dan ia mengulurannya, maka sembuhlah tangannya itu.”

Di pusat kekuasaan agama dan politik Yesus juga marah. Yesus marah karena agama dijadikan alat untuk kepentingan ekonomi dan politik para penguasa. Kolusi antara agama dan modal dan kolusi antara politik dan modal telah mengabaikan orang-orang pinggiran. Kita baca dalam Markus 11:15-19 sebagai berikut:

“Sesudah Yesus masuk ke Bait Allah, mulailah Ia mengusir orang-orang yang berjual-beli di halaman Bait Allah. Lalu Ia mengajar mereka kata-Nya: ‘Bukankah ada tertulis: Rumah-Ku akan disebut rumah sembahyang bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun!’ Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan Dia....”

“Sarang penyamun” menggambarkan secara tegas manipulasi dan monopoli ekonomi oleh para penguasa kaya di sekitar Bait Allah.

Sekarang ini di tengah-tengah putaran kapitalisme global yang meminggirkan, mengikuti Yesus tidak lepas dari tanggung jawab untuk menghentikan peminggiran kaum kecil yang tidak berdaya. Profesor dari Universitas London dan Universitas Ljubljana, Slavoj Žižek, melihat bahwa kapitalisme global hampir mendekati krisis terminal. Pemikiran itu dikemukakan dalam bukunya *Living in the End Times* (2nd: 2011). Gagasan apokaliptis seperti itu rasanya cukup masuk akal mengingat kapitalisme global memang melahirkan anak-anak yang memusuhi dirinya sendiri. Filsuf dan kritikus budaya dari Slovenia itu mengidentifikasi empat gejala menuju krisis terminal tersebut: (1) krisis ekologis yang mondial, (2) ketidakimbangan dalam sistem ekonomi, (3) revolusi biogenetik, dan (4) meledaknya pemisahan dan perpecahan sosial. Armagedon ekonomis ini akan menimbulkan berbagai rupa tanggapan: ada penolakan ideologis, ada amarah meledak, ada usaha-usaha *bargaining*, atau menarik diri dalam depresi. Kecuali itu masih ada satu kemungkinan tanggapan lagi, yakni menerima kenyataan itu dan mencoba menata kembali. Slavoj Žižek mengakhiri bukunya dengan gagasan mengenai komunisme.

“Sekarang ini komunisme bukanlah nama untuk sebuah solusi, melainkan nama dari sebuah masalah, yakni masalah “apa yang untuk umum bersama” (*the commons*) dalam segala dimensinya—apa yang untuk umum bersama dari alam sebagai substansi hidup kita, masalah mengenai apa yang biogenetik untuk umum bersama, masalah mengenai apa yang kultural untuk umum bersama (“*intellectual property*”), dan akhirnya, masalah apa yang untuk umum bersama sebagai *space* universal dari kemanusiaan, di mana tak seorang pun boleh dieksklusikan. Apa pun solusinya, mesti menyelesaikan masalah *the commons* ini”.

Apakah ramalan Zizek benar atau salah, apa yang dikemukakan Slavoj Zizek mengenai “the commons” itu sangat mendesak, karena orang-orang kecil yang semakin terpinggirkan semakin tidak mendapat akses terhadap “the commons”, terhadap “ranah publik”. Pernyataan itu mengingatkan saya akan teks Kisah Para Rasul 4:32: “Adapun kumpulan orang yang telah

percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama” (NRSV: “*everything they owned was held in common*”). Kisah Para Rasul tidak menyampaikan pesan untuk menempuh komunisme ala Uni Sovyet yang telah hancur. Rupanya jemaat awal juga tidak menghapuskan hak milik pribadi, melainkan secara radikal milik pribadi itu ditempatkan dalam fungsi sosialnya begitu rupa sampai dianggap “kepunyaan bersama”. Istilah Yunani yang dipakai oleh Kisah Para Rasul adalah “*koinos*” (Inggris: *in common, shared*; Jerman: *gemeinsam*). Hal itu dapat dijalankan karena mereka hidup dalam “*koinonia*”, persekutuan atau persaudaraan. Mengasihi sesama sebagai saudara berarti mendahulukan dan menjadi sesama bagi saudara yang tidak berdaya (Luk. 10:36-37).

Spiritualitas jemaat awal memberikan pesan untuk secara radikal menyadari bahwa selayaknya dunia ini tidak dikuasai oleh keserakahan yang mengakumulasi kekayaan untuk diri sendiri dan kelompoknya (atas nama hak pribadi, dan mungkin masih disejukkan dengan program “*Corporate Social Responsibility*”). Selayaknya *the commons* dari dunia seisinya ini diarahkan oleh gerakan solidaritas dan gerakan berbagi secara individual maupun struktural. Adakah dunia beserta kekayaannya ini tidak untuk umum bersama (*common home, common source*)? Berbagi merupakan spiritualitas Alkitab yang sangat mendasar.

Seorang profesor geografi dan ilmu-ilmu bumi serta ruang dari Universitas California, Laurence C. Smith, menulis sebuah buku berjudul *The World in 2050, Four Forces Shaping Civilization's Northern Future* (cetakan pertama, 2011). Smith mengolah informasi geografi, sejarah, dan data beserta proyeksinya. Dia menyebut empat kekuatan global—bersama dengan faktor-faktor lain yang lebih kecil—yang sedang membentuk peradaban kawasan Utara, yaitu kawasan lautan Arktik. Empat kekuatan itu adalah: (1) perkembangan demografi, (2) kebutuhan sumber daya alam, (3) globalisasi, dan (4) perubahan iklim.

Kawasan Utara (lautan Arktik), seperti negara-negara: Norwegia, Swedia, Finlandia, Rusia, Denmark, dan Islandia, akan menjadi semakin *powerful*, sedangkan negara-negara sekitar ekuator (jadi termasuk Indonesia) akan berjuang untuk *survival*. Pertanyaannya, bukanlah hanya seberapa banyak sumber-sumber yang dikonsumsi dapat atau tidak dapat ditampung ekosistem global. Pertanyaannya lebih mengarah pada “dunia kita ini nantinya masih mampu menampung berapa banyak orang”.

L. Smith melihat bukunya sebagai semacam kelanjutan dari dari buku koleganya, Jared Diamond (2005), yang berjudul *Collapse: How Societies Choose to Fail or to Succeed*. Diamond menyebutkan lima bahaya kunci yang mengancam eksistensi masyarakat. Tanpa urutan khusus

disebutkan: (1) lingkungan hidup yang tercemar dan kerusakan ekosistem, (2) kehilangan *partner* berdagang, (3) tetangga yang tidak bersahabat, (4) perubahan iklim yang memburuk, (5) bagaimana masyarakat memilih untuk merespons masalah-masalah lingkungan hidup. Salah satu faktor itu akan menekan hunian yang ada, dan beberapa faktor atau semua faktor itu bersama-sama akan mengantar ke kematian.

Smith mengemukakan pertanyaan sebaliknya: Apa yang menyebabkan peradaban baru tumbuh dan berkembang? Bagi dia, (1) pertama dan terutama adalah insentif ekonomi, kemudian diikuti (2) penghuni yang menetap, (3) *rule of law* yang stabil, (4) *partner* perdagangan yang dapat dijalankan, (5) tetangga yang bersahabat, dan (6) perubahan iklim yang menguntungkan. Tak satu pun dari faktor itu sendirian bisa menumbuhkan hunian yang penting, beberapa atau seluruh faktor itu akan mengantar lahirnya hunian baru, atau mendorong hunian-hunian yang ada untuk berkembang.

Apakah ramalan Smith yang sangat negatif tentang negara-negara sekitar ekuator itu benar atau tidak adalah kurang penting. Pertanyaannya bukanlah hanya seberapa banyak sumber-sumber yang dikonsumsi dapat atau tidak dapat ditampung oleh ekosistem global. Pertanyaannya lebih mengarah pada kapasitas dunia kita ini nantinya masih mampu menampung berapa banyak orang. Namun yang lebih penting lagi adalah pertanyaan dia sendiri sebagai kalimat terakhir dari bukunya, dunia macam apa yang kita inginkan sekarang ini? Ramalan sosial bukanlah ramalan magis, karena terhadap ramalan sosial itu manusia bisa menanggapi secara aktif dan berusaha mengurangi faktor-faktor negatif dan mengembangkan faktor-faktor positif. Dengan kata lain, manusia bisa mengubah ramalan dengan mengubah faktor-faktor sosial empiris mengenai perkembangan demografi, perubahan iklim, sumber daya alam, dan globalisasi. Pemikiran Smith menimbulkan pertanyaan kepada semua orang, apakah memilih untuk bersama-sama hidup atau bersama-sama mati.

Menurut Smith, krisis ekonomi 2008-2009 memperlihatkan bahwa dalam dunia dengan globalisasi ekonomi, bahkan mereka yang beruntung pun ikut menderita dari yang dipinggirkan (*"winners" suffer pain from the losers*: 260). Cerita itu mengingatkan saya pada Lukas 12:13-21 mengenai orang kaya yang bodoh. Nasihat Yesus berbunyi: "Hati-hatilah dan waspadalah, jangan sampai kalian serakah. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari kekayaan, walaupun hartanya berlimpah-limpah" (Luk. 12:15, *DBIMK*).

Sekitar 20 tahun lalu salah satu pertemuan asosiasi ekumenis para teolog dunia ketiga (EATWOT, *Ecumenical Association of the Third World Theologians*) telah mengangkat percakapan *"death-dealing"* or *"life-giving"*. Apa artinya bumi dengan pertumbuhan penduduk

seperti sekarang ini, kalau penghuninya adalah pelaku-pelaku yang berebutan dan menyingkirkan yang paling tidak berdaya? Karya penciptaan Allah menjangkau keseluruhan sebagai keutuhan. Oleh karena itu, yang paling jauh dari sentuhan penciptaan yang menghidupkan haruslah didahulukan. Itulah spiritualitas Alkitab yang sangat mendasar, berbagi dengan mendahulukan yang tidak kebagian, termasuk alam, agar alam juga menjadi faktor yang memberikan kehidupan. Ledakan penduduk dengan unsur-unsur kehidupan global bersama rasanya mengantar kita manusia pada pertanyaan: Berbagi atau mati?

Untuk memilih kehidupan haruslah diusahakan “*the common*” yang membuat kaum kelas atas maupun kelas bawah hidup. Sebab, pilihan untuk hidup hanya mungkin dalam hidup bersama. Pilihan yang serakah tidak hanya mematikan yang tersingkir di pinggir, melainkan juga yang beruntung di pusat. Sehubungan dengan ini pemikiran Hardt dan Negri kiranya sangat berguna untuk didiskusikan.

Dalam bukunya yang berjudul *Empire* (2001), Hardt and Negri berusaha menggambarkan suatu kedaulatan (*sovereignty*) dalam bentuk baru dan global. Kemudian dalam bukunya *Multitude* (2005), mereka mencoba menguraikan kenyataan pembentukan kelas global, yaitu *the multitude*. Mereka melihat gerak bukunya berbeda dengan Thomas Hobbes, yang mulai dari (*De Cive*, 1642) mengenai badan sosial dan bentuk-bentuk kewargaan yang sesuai dengan lahirnya kaum *bourgeoisie*. Kemudian dia bergerak ke *Leviathan* (1651), yang menggambarkan bentuk kedaulatan (*sovereignty*) yang kemudian berkembang di Eropa dalam bentuk *nation-state*. Hardt dan Nergi bergerak dari bentuk kedaulatan (*sovereignty*) ke kelas global baru, yaitu *multitude*, suatu alternatif kehidupan yang tumbuh dan berkembang dalam “*Empire*” (2005: xiii).

Multitude merupakan subjek sosial yang ditentukan dan bergerak tidak atas dasar identitas, seperti misalnya: buruh, petani, birokrat, dan kaum intelektual, dan lebih lagi, tidak oleh sikap acuh tak acuh, melainkan oleh “*on what it has in common*” (Hardt and Negri, 2004: 100). Sulit sekali menerjemahkan kata *multitude* dalam bahasa Indonesia. *Multitude* bukanlah hanya banyak orang dengan identitas tertentu (*people*), bukan *masses* (massa), bukan *crowd* (kerumunan), dan bukan *mob* (gerombolan). Dalam *multiude* tidak terdapat unsur-unsur sama yang rentan terhadap manipulasi dari luar. Untuk menjelaskan pengertian “*multitude*”, Hardt and Negri (2005: 140) antara lain menggunakan refleksi dari Fyodor Dostoyevsky (*The Devils*, 1973) mengenai roh jahat di daerah orang Gerasa dalam Markus 5:9, yang mengatakan “*Namaku Legion, karena kami banyak*” (*Legioon onoma moi, hoti polloi esmen*). Apa yang sungguh menakutkan adalah bahwa jumlah “*multitude*” itu tidak terbatas sekaligus satu. “*Multitude*” adalah legion yang terdiri dari elemen-elemen tak terbilang banyaknya yang tetap berbeda satu sama lain, dan meskipun demikian

berada dalam komunikasi, kolaborasi, dan aksi yang sama. Wajah positif dari "multitude" adalah kuat kuasa yang membebaskan, kuasa Kerajaan Allah, kuasa gerakan Yesus. Proses pembebasan dapat bergerak dalam "multitude".

Dengan demikian terdapat dua wajah globalisasi. Wajah pertama globalisasi adalah "Empire", yang meluaskan secara global jaringan hierarki dan pemisahan yang melestarikan tatanan melalui mekanisme kontrol dan konflik terus-menerus. Bagaimanapun juga globalisasi ini juga merupakan konstruksi sistem untuk hubungan dan kerja sama yang terbentang lintas bangsa dan benua serta membuka perjumpaan-perjumpaan yang tak terbatas. Wajah kedua dari globalisasi dapat disebut "multitude", yang membuka kemungkinan untuk menyatunya berbagai perbedaan dalam kesatuan tujuan sehingga komunikasi dan aksi bersama dapat dijalankan. "Multitude" juga dapat digambarkan sebagai "*network*": jaringan yang terbuka dan meluas di mana segala perbedaan dapat diungkapkan secara bebas dan setara, suatu jaringan yang menyediakan sarana-sarana perjumpaan agar kita dapat bekerja dan hidup dalam kesatuan, "*in common*" (2005: xiii-xiv).

"Multitude" terdiri dari perbedaan-perbedaan internal yang tak terbilang banyaknya yang tidak pernah dapat direduksikan menjadi kesatuan atau identitas tunggal. Perbedaan-perbedaan itu meliputi perbedaan kebudayaan, ras, etnisitas, gender dan orientasi seksual, perbedaan juga dalam bentuk kerja, cara dan pandangan hidup maupun perbedaan hasrat keinginan. "Multitude" merupakan kelipatan dari semua perbedaan masing-masing (2005: xiv). "Multitude" merupakan alternatif yang sedang hidup dan berkembang di tengah-tengah "Empire". Tumbuh dan berkembangnya "multitude" ini dipacu oleh apa yang Hardt dan Negri menyebutnya sebagai "biopolitical production" yang tidak hanya berupa produksi barang-barang material, melainkan juga meliputi segala faktor kehidupan sosial, kultural, dan politis. Produksi biopolitis beserta meluasnya dari apa yang menjadi milik bersama ("*the common*") adalah pilar kuat yang menggerakkan kemungkinan demokrasi global sekarang ini (2005: xv-xvi). Lebih dari itu Hardt dan Negri mengatakan bahwa "multitude" adalah satu-satunya subjek sosial yang mampu untuk merealisasikan demokrasi, yang adalah kuasa dari setiap orang oleh setiap orang, "*the rule of everyone by everyone*" (2005: 100). Dengan demikian dihentikan kehidupan yang diperintah oleh korporatokrasi, kuasa korporasi.

Pengertian "multitude" dari Hardt dan Negri dapat dibandingkan dengan *ochlos* dalam Injil Markus yang dikemukakan oleh Ahn Byung Mu (1982). Seperti *ochlos* dalam Injil Markus "multitude" terdiri dari bermacam-macam orang yang berbeda, namun Yesus berada pada pihak mereka. *Ochlos* adalah orang-orang yang berelasi positif dengan pemakluman Yesus mengenai Kerajaan Allah. "Multitude" berbeda dengan *ochlos* dalam Injil Markus, karena orang-orang yang mempunyai kekuasaan bisa masuk dalam "multitude" juga. Misalnya secara politis bukan hanya orang-orang Yahudi dalam pembuangan beserta Nabi Yehezkiel termasuk "multitude", melainkan juga Raja Kores dari Persia merupakan bagian dari "multitude". Secara ekonomis bukan hanya Lazarus dan Bartimeus, melainkan juga Zakheus orang kaya itu termasuk dalam "multitude".

Gerak “multitude” dapat disejajarkan dengan gerakan pembebasan. Yang membutuhkan pembebasan bukanlah hanya orang miskin, melainkan juga orang kaya. Orang miskin dibebaskan dari beban kemiskinannya, dan orang kaya dibebaskan dari godaan kekayaannya. Baik orang kaya maupun orang miskin perlu dibebaskan dari keserakahan. Orang kaya maupun orang miskin juga perlu dibebaskan dari mental yang mengurung mereka dalam kelasnya masing-masing (Pieris, 2013: 76-77). Meminjam kerangka berpikir pascakolonial, orang kaya maupun orang miskin perlu menjalani proses de-kolonialisasi. Namun pembebasan personal tidak mencukupi karena keserakahan telah mengganas dalam rupa organisasi raksasa. Oleh sebab itu, selalu diperlukan gerakan dari bawah, perjuangan komunitarian untuk memajukan kehidupan sosial.

Dalam kitab Amsal kita temukan doa singkat yang barangkali (hampir) tidak pernah kita doakan. Doa ini dapat disebut sebagai doa pembebasan bagi orang kaya dan pembebasan bagi orang miskin, bagi siapa saja dalam peziarahan mengabdikan Allah, menolak Mammon.

Ya Allah, “dua hal aku mohon kepada-Mu, jangan itu Kautolak sebelum aku mati, yakni: (1) Jauhkanlah dari padaku kecurangan dan kebohongan. (2) Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal-Mu dan berkata: Siapa Tuhan itu. Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku” (Ams. 30:7-9).

Teologi-teologi liberatif menggalang solidaritas di antara kaum pinggiran dan solidaritas terhadap kaum pinggiran. “Multitude” dapat digambarkan sebagai ikatan persaudaraan sebanyak mungkin orang yang berbeda-beda untuk memajukan persaudaraan semua orang yang lebih luas dan lebih mendalam. Rupanya “multitude” inilah yang mungkin dapat menjadi jalan untuk terciptanya sarana struktural untuk terciptanya kehidupan berbagi secara radikal (bdk. Kis. 4:32).

Pesimisme muncul karena “multitude” mengandaikan nilai universal kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Juga diperlukan religiusitas yang menerima dan mengikuti Allah sebagai Allah dari dan bagi semua orang. Hal ini juga berarti hidup dan bergerak dengan spiritualitas radikal berbagi yang tidak merelakan ada orang yang tidak dihitung dalam dunia ini. Bagaimanapun juga teologi pinggiran berpegang pada perjanjian Allah yang berada pada pihak kaum miskin tak berdaya, yang melalui Yesus menegaskan kembali penyertaan-Nya sampai akhir zaman. Gerakan memajukan kehidupan yang miskin tak berdaya merupakan harapan yang mengatasi segala harapan sampai akhir zaman. Itulah perjalanan bersama Yesus di dunia sekarang ini.

Sekarang ini kehidupan dan kegiatan EATWOT (*Ecumenical Association of Third World Theologians*) rasanya telah bergeser ke arah WFTL (*World Forum of Theology and Liberation*) dan WSF (*World Social Forum*). Hal ini tidak berarti bahwa teologi liberatif lokal dan nasional tidak penting lagi, melainkan bahwa teologi-teologi liberatif lokal, nasional harus semakin kuat

dan membangun jejaring mondial sebagai kekuatan untuk memperjuangkan “the common” secara lokal, nasional dan mondial. Kecuali itu diharapkan juga bahwa WFTL dan WSF menjadi jalan untuk menumbuhkan dan memperkuat gerakan dari “multitude for the common”. Betapapun jaringan itu masih lemah, sekurang-kurangnya pemikiran-pemikiran alternatif digulirkan dengan keyakinan “*another world is possible*”, dan pada waktunya sungguh menjadi alternatif kehidupan bersama manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahn Byung Mu. 1982. “Jesus and the Minjung in the Gospel of Mark”, dalam CTC-CCA (ed.), *Minjung Theology: People as the Subject of History*, Toa Payoh, Singapore, h. 138-152.
- Drache, Daniel. 2001. “The Return of the Public Domain after the Triumph of Markets”, dalam D. Drache (ed.), *The Market or the Public Domain: Global Governance and the Asymmetry of Power*, London: Routledge, h. 37-71.
- Hardt, Michael dan Antonio Negri. 2001 (cetakan ke-7). *Empire*, Cambridge: Harvard University Press.
- _____. 2005. *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, London: Pinguin Book.
- Herry-Priyono, B. 2004a. “Tiga Poros Indonesia”, *Kompas*, 9 Januari 2004.
- _____. 2004b. “Ranah Publik: Dari Mulut Pemerintah ke Rahang Pasar”, Manuscript.
- _____. 2006. “*Homo Oeconomicus*: Dari Pengandaian ke Kenyataan”, dalam I. Wibowo dan B. Herry-Priyono (ed.), *Sesudah Filsafat: Esai-Esai untuk Franz Magnis-Suseno*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____. 2008. “Perihal Ekonomi Yang Tercerabut”, dalam Mikhael Dua dkk. (ed.), *Politik Katolik, Politik Kebaikan Bersama: Sejarah dan Refleksi Keterlibatan Orang-orang Katolik dalam Politik Indonesia*, Jakarta 2008: Ikatan Sarjana Katolik Indonesia, Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya dan Penerbit Obor.
- Iman Pambagyo. 2015. “Perundingan WTO dan Indonesia”, *Kompas*, 17 April 2014.
- Kompas, Tajuk. 2013. “Tajuk Rencana: Memanfaatkan Tambang”, *Kompas*, 30 Oktober 2013.
- Korten, David. 1999. *The Post-Corporate World: Life After Capitalism*, Singapore: Alkem Company (S) Pte. Ltd.

- LAS. 2013. "Asing Semakin Mendominasi", *Kompas*, 7 November 2013.
- Lukita Grahadyarini, B.M. 2013. "Raksasa (Masih) Terlelap", *Kompas*, 22 November 2013.
- Madeley, John. 2001. *Hungry for Trade: How the Poor Pay for Free Trade*, terjemahan Indonesia: 2005. *Loba, Keranjingan Berdagang: Kaum Miskin Tumbal Perdagangan Bebas*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.
- Mangunwijaya, Y.B. 1997. "Globalisasi adalah Neokolonialisme Ekonomi dan Budaya", *Kompas*, 24 Januari 1998.
- Marquand, David. 2001. "Reinventing Gladstone? The Public Conscience and the Public Domain", dalam Daniel Drache (ed.), *The Market or the Public Domain: Global Governance and the Asymmetry of Power*, London: Routledge.
- MAS/WHO/RWN/BAY/EGI/ETA/ILO. 2013. "Tata Niaga Kedelai: Rakyat Susah, Importir Untung Rp 1 Triliun", *Kompas*, 12 September 2013.
- Pieris, Aloysius. 1999. *God's Reign for the Poor: A Return to the Jesus Formula*, Gonawila-Kelaniya: Tulana Research Centre.
- _____. 2013. *The Genesis of an Asian Theology of Liberation: An Autobiographical Excursus on the Art of Theologizing in Asia*, Gonawala-Kelaniya: Tulana Research Centre.
- Santosa, Dwi Andreas. 2013. "Politik Pangan Global", *Kompas*, 30 Desember 2013.
- _____. 2014. "Ancaman Bencana Pangan", *Kompas*, 26 Maret 2014.
- _____. 2015. "Swasembada Tanpa Petani", *Kompas*, 12 Mei 2015.
- Smith, Laurence C. 2013. *The World in 2050: Four Forces Shaping Civilization's Northern Future*, New York: A Plume Book, Penguin Groups.
- Sri-Edi Swasono. 2012. "Kemiskinan dan Pengangguran", *Kompas*, 28 Juli 2012.
- _____. 2013. "Menjadi Tuan di Negeri Sendiri", *Kompas*, 24 September 2013.
- Wibowo, I. 2010. *Negara Centeng: Negara dan Saudagar di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Yustika, Ahmad Erani. 2014. "Ekonomi dan Kontestasi Politik", *Kompas*, 3 Maret 2014.
- Žižek, Slavoj. 2011. *Living in the End Times*, London: Verso.